



UPAYA PERLINDUNGAN PELAJAR INDONESIA DI TURKI

Sita Hidriyah*)

Abstrak

Dua orang mahasiswi Indonesia ditangkap oleh aparat keamanan Turki pada 11 Agustus 2016 di rumah tinggalnya di kota Bursa, Turki. Alasan penangkapan tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas Fatullah Gulen (Gulen) di Turki. Pada akhirnya, upaya pemerintah Indonesia dengan memberikan pendampingan hukum dan bersikap proaktif dengan pemerintah Turki membuahkan hasil setelah dua minggu penangkapan. Kejadian ini menjadi pelajaran sekaligus perhatian besar bagi pemerintah Indonesia dimana Turki sedang melakukan pembersihan terhadap kelompok Gulen. Pemerintah diharapkan untuk terus dapat melindungi WNI yang berada di luar negeri sesuai komitmen dalam UUD 1945 serta hak sebagai WNI untuk dilindungi oleh negara.

Pendahuluan

Sejak pemberlakuan status darurat pasca kudeta yang gagal pada 15 Juli 2016 lalu, otoritas Turki telah menahan sekitar 16.000 orang. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Turki untuk membersihkan negaranya dari kelompok-kelompok yang dianggap terafiliasi dengan *Fethullah Gulen Terrorist Organization* (FETO) yang ditengarai sebagai dalang aksi kudeta. Pembersihan jaringan Gulen yang dilakukan otoritas Turki ternyata juga berdampak terhadap warga negara Indonesia yang berada di Turki. Dituduh terkait dengan jaringan Gulen, dua pelajar Indonesia ditangkap di sebuah rumah bersama beberapa orang lainnya. Setelah mengalami penahanan selama dua minggu

dan terbukti tidak bersalah, dua pelajar asal Indonesia tersebut dibebaskan oleh pihak otoritas Turki pada 25 Agustus 2016. Mengapa insiden penangkapan itu bisa terjadi? Bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi mereka? Tulisan singkat ini mencoba menggambarkan hal tersebut, sehingga kemudian dapat diambil pelajaran yang perlu menjadi perhatian bersama pemerintah dan parlemen guna mencegah hal serupa terjadi kembali.

Pembersihan Gerakan Gulen Pasca Kudeta

Fethullah Gulen adalah ulama berusia 75 tahun yang menjadi buah bibir di Turki. Gulen yang menetap di Amerika

*) Peneliti Muda Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: sita.hidriyah@dpr.go.id



Serikat (AS) disebut-sebut sebagai dalang kudeta militer yang gagal menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan pada 15 Juli 2016. Bukan kali ini saja Gulen dituding hendak menggulingkan Erdogan. Beberapa tahun lalu saat skandal korupsi dan suap menjerat orang-orang dekat Erdogan, nama Gulen kembali dituduh sebagai penggerak penyidikan polisi dan kejaksaan saat itu.

Sebelumnya, tiga tahun lalu, Gulen masih merupakan karib sekaligus sekutu Erdogan, yang saat itu masih menjabat perdana menteri dan memainkan peran penting terkait meroketnya karier politik Erdogan. Para pendukung Gulen, yang banyak bekerja di institusi kehakiman dan kepolisian, mendukung upaya menyingkirkan musuh pemerintah, khususnya anggota militer, yang diduga merancang upaya kudeta. Namun, keduanya menjadi musuh besar setelah pada 2013, Erdogan dan Partai Pembangunan dan Keadilan atau *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP) yang berkuasa menuding Gulen merancang tuduhan korupsi yang menjerat sejumlah pejabat senior dan putra Erdogan, Bilal. Menyusul dugaan kasus korupsi itu, pemerintahan Erdogan menggelar pembersihan untuk menyingkirkan para pendukung Gulen dari posisi kemiliteran, polisi, dan kehakiman. Para jurnalis dan media massa yang diduga memiliki keterkaitan dengan Gulen juga menjadi sasaran pembersihan.

Sejak upaya kudeta yang gagal pada Juli 2016 lalu, pemerintah Turki berupaya menahan semua pengikut Gulen. Pemerintah Turki sudah secara resmi melabeli kelompok Gulen sebagai organisasi teroris dan menyebutnya sebagai FETO. Penahanan tersebut dilakukan di semua lini, termasuk di antaranya LSM pendidikan Pasiad. Pemerintah Turki telah menutup beberapa institusi pendidikan swasta karena diduga terkait dengan gerakan Gulen ataupun membantu terlaksananya kudeta.

Insiden Penangkapan Pelajar Indonesia

Pada 11 Agustus 2016, aparat keamanan Turki menangkap dua pelajar Indonesia di sebuah rumah tinggal yang berada di kota Bursa, sekitar 400 kilometer sebelah barat Ankara, Turki. Kedua pelajar itu, DP asal Demak, Jawa Tengah, dan YU asal Aceh, merupakan mahasiswi yang tengah

menjalani pendidikan di Turki karena memperoleh beasiswa dari sebuah lembaga swadaya masyarakat asal Turki bernama *Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association* atau Pasiad. Pasiad merupakan salah satu yayasan yang dinyatakan otoritas Turki sebagai yayasan yang terafiliasi dengan Gulen. Otoritas Turki bahkan berusaha menutup sekolah di Indonesia yang bekerjasama dengan Pasiad. Dalam rilis pers tertanggal 28 Juli 2016, Kedutaan Besar Turki di Jakarta mengumumkan bahwa Pasiad terkait dengan Gulen dan meminta sembilan sekolah yang tersebar di Indonesia ditutup karena bekerja sama dengan Pasiad. Tetapi permintaan itu ditolak oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia. Rumah yang merupakan fasilitas yang dikelola oleh Yayasan Pasiad mereka akui sebagai tempat tinggalnya. Latar belakang ini yang kemudian menjadi alasan aparat Turki menahan mereka bersama beberapa orang lainnya yang juga dianggap terkait dengan Gulen.

Melalui upaya diplomasi, yaitu pendekatan dan komunikasi intensif dari pemerintah Indonesia, dua pelajar Indonesia tersebut dibebaskan oleh otoritas Turki pada 25 Agustus 2016 karena terbukti tidak memiliki kaitan dengan gerakan Gulen yang ditengarai mendalangi kudeta beberapa waktu lalu. Keduanya diserahkan oleh otoritas Turki kepada staf KBRI di Bursa.

Upaya Perlindungan WNI di Turki

Pasca peristiwa kudeta yang gagal pada Juli lalu, pemerintahan Erdogan sangat serius dalam membersihkan pengaruh kelompok Gulen. Hal ini tentunya dapat berdampak pada para pelajar Indonesia yang sedang menjalani pendidikan di sana, terutama mereka yang disponsori yayasan milik Gulen dan tinggal di rumah-rumah yang dikelola yayasan. Tampaknya pemerintah Indonesia sudah memulai upaya antisipasi menghindari dampak negatif status darurat Turki terhadap pelajar Indonesia di sana. KBRI di Turki telah meminta agar pelajar Indonesia yang belajar di sana menghindari aktivitas di luar pendidikan. KBRI menyampaikan kepada mahasiswa agar tidak mengikuti kegiatan apapun di luar aktivitas pendidikan dan sekolah, serta senantiasa berada di tempat

yang netral dan menjalin komunikasi yang sering dengan KBRI. Namun, penahanan terhadap dua pelajar Indonesia di Bursa, menunjukkan bahwa upaya antisipasi tersebut tidak sepenuhnya efektif. DPR mengecam penangkapan tersebut.

Setelah memperoleh laporan bahwa terjadi penahanan terhadap pelajar Indonesia, maka selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pendampingan dan perlindungan. Beberapa upaya telah dilakukan KBRI Ankara untuk memberikan perlindungan. Pada 12 Agustus 2016, staf KBRI Ankara telah mendatangi kepolisian Bursa untuk meminta akses kekonsuleran. Pada tanggal 15 Agustus, KBRI menyampaikan nota kepada Kemenlu Turki yang meminta klarifikasi dasar penangkapan tersebut. Selanjutnya pada 16 Agustus 2016, KBRI Ankara mendatangi Pengadilan Bursa untuk bertemu dengan jaksa penuntut. Langkah ini untuk mengantisipasi jika nantinya kasus tersebut masuk ke pengadilan. Selain itu, Kemlu sudah memanggil *charges d'affaires* (kuasa usaha) dari Kedutaan Besar Turki di Indonesia untuk menyampaikan penjelasan mengenai penahanan WNI di Turki yang kebetulan mendapat beasiswa Pasiad. KBRI sudah memastikan bahwa kedua mahasiswi itu didampingi pengacara. Segera setelah mengetahui penangkapan itu, KBRI juga telah menghubungi keluarga kedua mahasiswi untuk menyampaikan kejadian tersebut.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi terus berupaya mendapatkan akses kekonsuleran dari pemerintah Turki. Hal tersebut dilakukan untuk dapat bertemu dengan mereka. Menlu mengatakan dirinya dan jajarannya bertemu dengan beberapa pejabat Turki dan Dubes Turki untuk Indonesia untuk membicarakan pemberian akses kekonsuleran. Karena pemberian akses kekonsuleran adalah tanggung jawab pemerintah Turki sebagai negara penerima para WNI. Kemenlu Indonesia memastikan bahwa pemerintah terus mendampingi kedua pelajar yang ditangkap.

Selain mengupayakan pendampingan terhadap kedua pelajar yang ditahan, Menlu juga melakukan pemetaan kepada mahasiswa Indonesia yang berada di Turki. Hasilnya ada total 738 mahasiswa yang

berada di Turki. Dua ratus empat puluh delapan mahasiswa di antaranya mendapatkan beasiswa. Menlu telah memberikan saran kepada mereka untuk meninggalkan tempat-tempat yang berhubungan dengan organisasi yang saat ini sedang bermasalah dengan pemerintah Turki. Satu hal yang penting adalah bahwa Indonesia tidak mencampuri politik dalam negeri Turki. Yang utama menjadi *concern* adalah perlindungan kepada WNI. Selain itu, perlu dilakukan langkah antisipatif terhadap kemungkinan penangkapan WNI lainnya di Turki. Hal ini mengingat semakin buruknya hubungan antara Presiden Recep Tayyip Erdogan dan lawan politiknya.

Pemerintah Indonesia perlu menghormati "State of Emergency" (Keadaan Darurat) yang diterapkan oleh pemerintah Turki, yang mengambil kebijakan-kebijakan untuk menstabilkan negaranya dari segala bentuk ancaman pascakudeta. Namun dengan situasi yang berkembang, pemerintah Turki perlu memastikan, menginformasikan jika terjadi penangkapan kembali apakah dugaan tersebut terbukti benar atau salah secara cepat dan tepat. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kembali salah penangkapan dalam waktu yang lama, terutama dengan memberikan akses kekonsuleran bagi perwakilan Indonesia.

Penutup

Insiden penahanan terhadap dua pelajar Indonesia di Turki perlu menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia dan parlemen. Merespons perkembangan situasi politik dalam negeri Turki, pemerintah Indonesia sudah memulai upaya-upaya antisipatif agar warga Indonesia yang berada di Turki tidak terkena dampak negatif dari kondisi tersebut. Namun nyatanya, upaya tersebut tidak sepenuhnya memadai sehingga berujung pada penahanan dua pelajar Indonesia. Pemerintah perlu memikirkan langkah lebih jauh agar insiden serupa tidak terjadi lagi di negara mana pun WNI berada. Himbauan terhadap pelajar Indonesia di luar negeri untuk tidak terlibat politik praktis negara lain tampaknya cukup penting guna menghindari terjadinya hal serupa.

Selama dua pelajar Indonesia ditahan, Kemenlu melaksanakan tugasnya dalam memberikan pendampingan dan

perlindungan. Salah satu hal yang perlu menjadi catatan adalah pentingnya akses kekonsuleran bagi perwakilan Indonesia dalam menjalankan tugasnya melindungi warga negara Indonesia yang di luar negeri. Terkait penangkapan ini, menjadi tanggung jawab pemerintah Turki sebagai negara penerima WNI untuk memberikan akses kekonsuleran. Dengan tetap menghormati status darurat dan segala tindakan terkait yang dijalankan pemerintah Turki, serta menjaga hubungan baik yang sudah terbangun lebih dari 50 tahun, pemerintah Indonesia tetap perlu mengingatkan pemerintah Turki mengenai pentingnya akses kekonsuleran bagi perwakilan Indonesia di Turki terutama dalam upaya pemerintah Indonesia melindungi warga negaranya.

Referensi

- “Krisis Turki: RI Siapkan Pengacara bagi 2 Mahasiswi”, *Kompas*, 20 Agustus 2016.
- “Kudeta Turki: 2 Mahasiswi RI Bebas, Buah Diplomasi Intensif”, *Kompas*, 27 Agustus 2016.
- “Pemerintah Dampingi Dua Mahasiswi di Turki”, *Republika*, 20 Agustus 2016.
- “DPR Kecam Penangkapan Dua Mahasiswi Indonesia di Turki”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/08/19/oc5eex361-dpr-kecam-penangkapan-dua-mahasiswi-indonesia-di-turki>, diakses 22 Agustus 2016.
- “DPR Minta Kemenlu Bebaskan Dua Mahasiswi Indonesia di Turki”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/08/19/oc5eqi361-dpr-minta-kemenlu-bebaskan-dua-mahasiswi-indonesia-di-turki>, diakses 23 Agustus 2016.
- “Fethullah Gulen, Bekas Sekutu yang Menjadi Musuh Erdogan”, <http://internasional.kompas.com/read/2016/07/19/11591911/fethullah.gulen.bekas.sekutu.yang.menjadi.musuh.erdogan?page=all>, diakses 22 Agustus 2016.
- “Menlu Lakukan Upaya Diplomatik untuk Bertemu 2 Mahasiswi Indonesia di Turki”, <https://news.detik.com/berita/3281387/menlu-lakukan-upaya-diplomatik-untuk-bertemu-2-mahasiswi-indonesia-di-turki>, diakses 23 Agustus 2016.
- “RI Wants Consular Access For Two Students Detained in Turkey”, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/08/24/ri-wants-consular-access-for-two-students-detained-in-turkey.html>, diakses 24 Agustus 2016.
- “Upaya Kudeta Gagal, Presiden Bersihkan Tubuh Militer”, http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160715_live_turki_militer, diakses 23 Agustus 2016.